

10 TAHUN



RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

PERJALANAN RUU TPKS

MENJADI UU TPKS

Sejak 2012, masyarakat sipil menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kekerasan seksual, mendorong pembahasan di DPR, dan mengawal sampai pengesahan. Setelah 10 tahun diperjuangkan, akhirnya pada 12 April 2022 DPR setuju untuk mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang-Undang (UU).

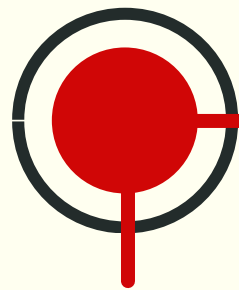
Perjalanan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi yang baik antara masyarakat sipil dari semua lapisan dengan DPR, terutama individu anggota legislatif, yang kemudian berhasil memengaruhi sikap fraksi dan partai untuk mendukung UU TPKS.

Bagaimana perjalanan 10 tahun pengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS? Mari simak!



Mei 2016

Draf RUU PKS dan naskah akademik pertama kali diserahkan ke DPR oleh Komnas Perempuan serta Forum Pengada Layanan (FPL)



2012

Komnas Perempuan bersama kelompok masyarakat sipil menginisiasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)



KOMISI NASIONAL
ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN

April 2017

RUU PKS disepakati sebagai
RUU inisiatif DPR

Juni 2016

RUU PKS masuk Prolegnas
Prioritas 2016

Desember 2017

RUU PKS masuk Prolegnas
Prioritas 2018

PENGUSUL



Nihayatul Wafiroh
(F-PKB)

Ammy Amalia
(F-PAN tahun 2016)

PENDUKUNG



Rahayu Saraswati
(F-Gerindra)

Diah Pitaloka
(F-PDIP)

Februari 2019

Pembahasan RUU PKS
ditunda sampai selesai
Pemilu 2019

Juni 2020

RUU PKS dikeluarkan dari
Prolegnas Prioritas 2020

Desember 2019

RUU PKS masuk Prolegnas
Prioritas 2020

Sangat **kaget dan kecewa** dengan
dikeluarkannya RUU PKS dari Prioritas
Prolegnas di tengah meningkatnya
kasus kekerasan seksual dalam
masa Covid-19.

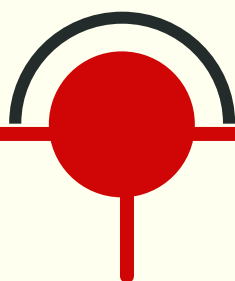
Veni Siregar
(Forum Pengada Layanan)

Sumber: Kompas.com



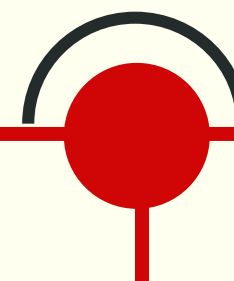
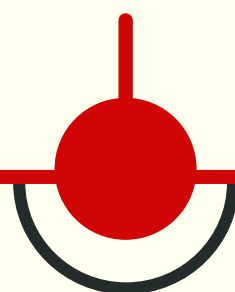
September 2021

RUU PKS berganti nama
menjadi RUU TPKS



Maret 2021

RUU PKS masuk Prolegnas
Prioritas 2021 yang diusulkan
fraksi NasDem, PDIP, dan PKB



November 2021

Rapat Panja pembahasan
RUU TPKS



Taufik Basari
(F-NasDem)



Diah Pitaloka
(F-PDIP)



Luluk Nur Hamidah
(F-PKB)

8 Desember 2021

RUU TPKS disetujui oleh
Baleg menjadi RUU
inisiatif DPR

4 Januari 2022

Pernyataan Presiden
mendorong percepatan
pengesahan RUU TPKS

16 Desember 2021

RUU TPKS tidak dibahas Rapat
Paripurna DPR untuk disahkan
sebagai inisiatif DPR



5 April 2022

Harmonisasi substansi RUU
TPKS di Tim Perumusan
dan Tim Sinkronisasi

28 Maret - 4 April 2022

Daftar Inventarisasi Masalah
(DIM) RUU TPKS Pemerintah
dibahas bersama Panja

6 April 2022

Rapat Pleno di Baleg
menyetujui pengesahan RUU
TPKS menjadi UU TPKS

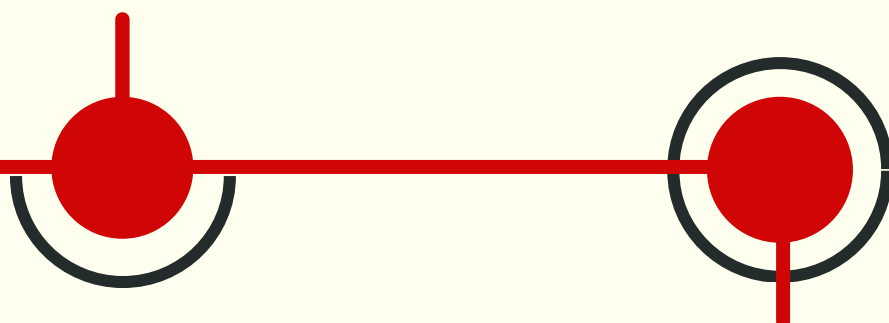
MASYARAKAT
SIPIL MENGAWAL



KEMEN PPPA

12 April 2022

Rapat Paripurna DPR RI
mengesahkan RUU TPKS
menjadi UU TPKS



.....

Presiden menandatangani
naskah UU TPKS



Terima kasih kepada semua pihak yang terus membela korban dan penyintas sehingga RUU TPKS bisa disahkan.

Masyarakat sipil dari segala lini:

FPL, INFID, KPI, JKP3, LBH APIK, dll

Aktivis:

Veni Siregar, Wahidah Suaib, Mike Verawati, Ratna Batara Munti, Sonya Hellen Sinombor, dll

Tokoh publik yang menggunakan suaranya untuk mendorong pengesahan RUU TPKS:

Kartika Jahja, Hannah Al Rashid, Kalis Mardiasih, dll

Anggota Panja RUU TPKS:

Willy Aditya, Taufik Basari, Luluk Nur Hamidah, MY Esti Wijayati, Diah Pitaloka, Christina Aryani, dll

Utamanya terima kasih kepada semua korban serta penyintas yang berani bersuara dan menuntut keadilan.